



00264 / Perms
KPK / 2015
130200264

A ksl 4

BERAKHIR DI BINTANG TIMUR



tidak melakukan tindak pidana, karena tidak ada bukti keputusan Cirus itu dibuat lantaran adanya penyuaapan.

Benarkah tak ada penyuaapan? Seharusnya Darmono tidak terburu-buru mengatakan hal itu. Sidang rekayasa dengan Arafat sebagai terdakwa masih berjalan. Masih terbuka kemungkinan munculnya bukti. Apalagi Arafat dan Gayus justru melihat adanya peran Cirus. Sebagai jaksa, Darmono seharusnya peka terhadap kemungkinan itu, bukan malah mematakannya. Hal itu justru membuat Kejaksaan Agung terkesan menutupi kemungkinan keterlibatan anggotanya. Apalagi keputusan Darmono itu dikeluarkan berdasarkan penyelidikan internal. Tak ada jeruk yang makan jeruk, kan?

Seharusnya, ketika keterlibatan Cirus sudah mulai terendus, Kejaksaan menyerahkan kasus ini ke pihak yang lebih independen dan tepercaya. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menyerahkan kasus Cirus ke KPK, Kejaksaan justru terlihat tegas dan memang punya kemauan bermain bersih. Bahkan, jika kemudian KPK membuktikan keterlibatan Cirus, nama Kejaksaan tak akan tercoreng karena, paling tidak, tampak berikti-

kad menyelesaikan kasus ini dengan benar.

Masalahnya, sejak awal, kasus Cirus terlihat seakan-akan diarahkan untuk menjadi bantut. Misalnya, tak ada laporan perkembangan penyelidikan kasus ini oleh polisi dalam sekian bulan. Penerbitan surat pemberitahuan dilakukan penyidikan atas nama Cirus dan Poltak pun simpang-siur. Hal kedua yang menguatkan adalah tidak disertakannya nama Cirus dan Poltak dalam sidang Arafat dengan berbagai alasan. Kejaksaan, sebagai penuntut umum, hanya menjadikan dua polisi (Arafat dan Ajun Komisariss Sri Sumartini) sebagai terdakwa. Padahal, jika mendengar kesaksian Arafat, dua jaksa itu punya peran penting dalam kasus tersebut. Bahkan merekalah kuncinya.

Terburu-buru "membersihkan" peran Cirus dalam kasus ini, tak bisa tidak, merupakan tindakan kontraproduktif bagi Kejaksaan Agung. Lebih dari itu, tindakan ini juga melukai rasa keadilan masyarakat. Bukannya menganggap Kejaksaan tidak terlibat dalam kasus rekayasa pembebasan Gayus, masyarakat justru mencurigai ini sebagai sebuah rekayasa untuk menutupi rekayasa. ■

Menciptakan Kereta Aman

Kecelakaan kereta api masih terus menghantui. Perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan masinis harus ditingkatkan.



KERETA api mestinya tak pernah celaka—apalagi bertabrakan—jika semua sistem berjalan baik. Alat transportasi murah meriah ini berjalan di atas rel. Tak bisa sembarangan belok kanan belok kiri kalau relnya tidak berbelok. Tapi kenapa kerap terjadi petaka, bahkan bertabrakan sesamanya, seperti yang terjadi di Stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, dua pekan lalu?

Ada tiga hal utama yang harus diperhatikan. Kondisi rel: apakah tidak ambles diserang banjir, patah karena lapuk, dan bantalan ompong lantaran dicuri. Sistem persinyalan: apakah berfungsi dengan baik. Lalu faktor manusia: dari masinis, pengatur perjalanan, sampai penjaga perlintasan.

Kasus di Pemalang, sampai saat ini, dinyatakan sebagai *human error*. Halik Rudianto, masinis kereta api Argo Bromo Angrek yang datang dari Jakarta, terlelap ketika memasuki Stasiun Petarukan. Sistem persinyalan sudah normal, ada lampu merah, yang seharusnya tak aman dimasuki. Karena Halik lelap, tentu ia tak melihat apa-apa. Si Argo terus meluncur dan tertabraklah kereta Senja Utama yang sedang berhenti di sana. Ada 32 jiwa melayang.

Kalau benar penyebabnya itu—belum ada keputusan pengadilan—mari bertanya: apa kabar para masinis? Menurut catatan, dari sekitar 5.000 masinis, baru 1.500 yang lolos sertifikasi. Artinya, ada 3.500 masinis tanpa sertifikasi "mengemudi" kereta api. Berapa gaji mereka? Paling tinggi Rp 5,5 juta, dan yang menerima itu jumlahnya sedikit. Lalu mereka tinggal jauh dari depo lokomotif.

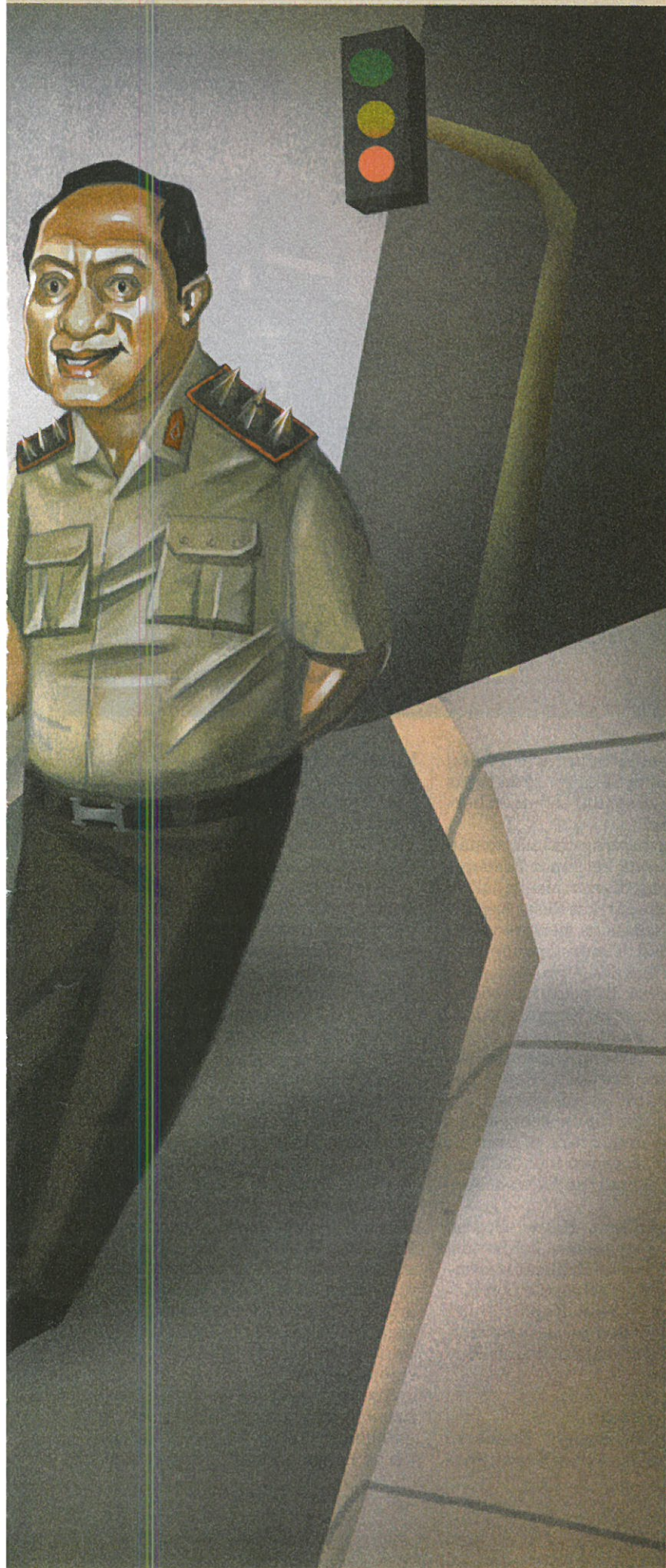
Mereka juga bekerja sambil, seperti mengojek, membantu istri buka warung, untuk menambah penghasilan. Jadi mereka sudah capek bekerja di tempat lain dan lelah di perjalanan sebelum menjalankan lokomotif. Memang

ada aturan, sebelum bertugas, masinis diperiksa kesehatannya. Nah, bisa ditebak bagaimana prosedur pemeriksaan itu. Kalau masinis dinyatakan tak sehat, seberapa sigap petugas mencarikan masinis pengganti?

Lelah atau tertidur memang "penyakit" manusia. Teknologi kemudian menyiasati agar kelemahan itu bisa diatasi. Di setiap lokomotif disediakan beberapa alat yang dapat "membangunkan" masinis. Ada alat pengejut yang bersuara keras jika lokomotif melanggar sinyal merah. Ada pula yang disebut *deadman pedal*, yang intinya membuat masinis tak boleh tidur karena harus menginjak dan melepas pedal secara berkala. Jika injak-lepas itu diabaikan, alarm berbunyi, sistem pengereman terjadi—dan kereta berhenti. Pertanyaannya: apakah semua itu berfungsi?

Intinya, PT KAI, sebagai satu-satunya pengelola kereta api di negeri ini, harus memberikan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan alat-alat ini, bahkan mengembangkan alat yang lebih canggih, semacam *global positioning system* (GPS), yang bisa memantau semua kereta lewat satelit. Membangun infrastruktur juga tak bisa diabaikan, termasuk rencana rel ganda yang sudah lama diomongkan.

Yang sama sekali tak boleh dilupakan, perhatikan nasib para masinis. Kesejahteraan mereka wajib ditingkatkan. Cobalah lihat wajah mereka di atas lokomotif: capek, *kucel*, kepanasan—dan masih *ngobyek* dengan membiarkan penumpang berada di loko. Di luar itu, wacana "kereta api swasta" bisa dibuka. PT KAI tak bisa seumur-umur menjadi satu-satunya operator kereta api di Indonesia. Perlu ada "pesaing" untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan, sebagaimana yang sudah terjadi di berbagai alat transportasi lainnya. ■



TIMUR PRADOPO DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA KEPOLISIAN RI PADA DETIK-DETIK TERAKHIR. ISTANA MENOLAK NANAN SOEKARNA. SENAYAN TAK MENERIMA IMAM SUDJARWO.

BAK juru foto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan kameranya ke para suporter yang bersorak-sorai. Final sepak bola hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia sedang berlangsung di bawah guyuran hujan, Ahad sore dua pekan lalu. Dua kesebelasan Angkatan Darat berhadapan.

Di panggung kehormatan, ada juga Wakil Presiden Boediono, Panglima TNI Marsekal Agus Suhartono, Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri, juga sejumlah menteri. Mengenakan kaus merah-putih berlambang Garuda, Yudhoyono sesekali tersenyum menyaksikan pendukung kedua tim yang terlihat kompak.

Pertandingan berakhir setelah hujan reda menjelang petang. Tim Angkatan Darat A menjadi juara, mengalahkan Tim B 1-0. Segera setelah final di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Selatan ini, Presiden mengarahkan "kamera lain" buat mengatasi persoalan gawat: mencari calon baru Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Dia tahu politik di Senayan menolak jagoannya," kata sumber *Tempo*.

Dua calon disiapkan di meja Presiden, yakni Komisaris Jenderal Nanan Soekarna dan Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo. Yudhoyono lebih menjagokan Imam, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. Sumber *Tempo* mengatakan Imam dianggap belum banyak "terkontaminasi" persoalan-persoalan di kepolisian. Tapi ia pilihan berisiko. Sebab, sejumlah partai besar di Dewan Perwakilan Rakyat kemungkinan besar menolaknya. Tak ada jalan lain, calon baru harus diajukan.

Ahad malam yang sibuk. Presiden menghubungi sejumlah orang yang dia percaya. Mereka antara lain, menurut sumber, Jenderal Purnawirawan Sutowo, mantan Kepala Kepolisian yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Nama Inspektur Jenderal Timur Pradopo, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, mulai mencuat.

Seperti biasa, Yudhoyono memperhatikan persoalan detail. Ia rupanya mendengar rumor tentang kehidupan pribadi Timur, perwira alumnus Akademi Kepolisian 1978. Rumor ini disingkirkan, menurut sumber lainnya, karena dianggap tak didukung bukti kuat. *From zero to hero*, Timur muncul di tikungan terakhir, menyingkirkan Nanan dan Imam, yang selama beberapa pekan belakangan terus disebut sebagai calon terkuat.

ILUSTRASI: KENDRA PARAMITA



ANTARA/WIDODO S. JUSUF

Langkah harus segera diambil. Presiden tak punya banyak waktu buat mengajukan calon ke Dewan. Sebab, ia dijadwalkan terbang ke Belanda pada Selasa pekan lalu—walau kemudian batal pada menit terakhir. Senin pagi, Presiden menggelar rapat khusus di kantornya. Ia mengundang Wakil Presiden Boediono; lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Sutanto; dan Bambang Hendarso.

Yudhoyono menyampaikan keputusannya buat mengajukan Timur. Ia lalu memerintahkan Bambang Hendarso segera menyiapkan kenaikan pangkat Timur menjadi bintang tiga. Caranya, menempatkan Timur ke posisi Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan, yang segera ditinggal pensiun Komisaris Jenderal Iman Haryatna.

Djoko Suyanto membenarkan adanya rapat khusus pada Senin pagi itu. "Memang ada pembahasan," katanya. Wakil Presiden Boediono juga mengaku dilibatkan dalam pembahasan. "Dalam pembahasan itu saya ada," katanya ketika berkunjung ke kantor *Tempo*, Jumat pekan lalu.

Mendapat perintah, Bambang Hendarso bergerak cepat. Sesaat setelah Yudhoyono membuka rapat kabinet pada pukul 11.55, ia meninggalkan Is-

tana Negara menuju kantornya di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. "Ada tugas penting," katanya sambil setengah berlari menuju mobil.

Tugas penting itu serah-terima jabatan dari Iman Haryatna ke Timur Pradopo. Dalam acara yang digelar mendadak di ruang rapat utama Markas Besar Kepolisian, Bambang sekaligus mengukuhkan kenaikan pangkat Timur. Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya yang ia tinggalkan diisi Inspektur Jenderal Sutarman, sebelumnya Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Misi selesai, Bambang Hendarso balik lagi ke kantor Presiden sekitar pukul 17.45. Kali ini ia membawa surat baru pengajuan Timur sebagai calon Kepala Kepolisian. Ini dilakukan agar Presiden bisa segera meneken surat pencalonan Timur ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Satu jam kemudian, Ketua Dewan Marzuki Alie menggelar konferensi pers. Ia menyatakan telah menerima surat pengajuan Timur sebagai calon Kepala Kepolisian. "Calon Kapolri yang akan menjalani *fit and proper test* adalah Timur Pradopo," kata politikus Partai Demokrat itu.



JENDERAL Bambang Hendarso awalnya hanya mengajukan Nanan Soe-

karna dan Imam Sudjarwo ke Presiden. Komisi Kepolisian Nasional yang diketuai Djoko Suyanto juga menyorongkan nama dua jenderal itu, menurut sumber, plus Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Gorries Mere.

Imam calon terkuat. Ia terus disebut dalam rapat sekretariat gabungan koalisi partai politik pendukung Yudhoyono. "Dalam rapat terakhir pada Rabu dua pekan lalu, tetap Imam Sudjarwo yang diunggulkan," kata seorang politikus yang mengikuti rapat-rapat di sekretariat gabungan. "Kami terkejut dengan munculnya nama baru."

Sejumlah orang di lingkungan Cikeas menyebutkan, Imam dinilai relatif lebih bersih. Ia juga sejalan dengan "rencana jangka panjang" keluarga Cikeas. Ia teman seangkatan Mayor Jenderal Pramono Edhie Wibowo, adik ipar Yudhoyono, Panglima Kodam Siliwangi, yang akan segera menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Dengan Imam duduk menjadi Kepala Kepolisian, tak ada kritik jika tahun depan Pramono menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, lalu berikutnya Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Sayang, pencalonan Imam tak mulus. Pengalamannya memimpin dianggap belum cukup. Banyak berkarier di korps Brigade Mobil, pengalaman ter-

tinggi Imam di daerah adalah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Bangka-Belitung. Tak memiliki problem yang kompleks, wilayah itu dikategorikan kelas dua.

Para politikus pun belum bisa menerima pencalonan Imam. Penghuni Gedung Dewan banyak menyokong Nanan, yang memang rajin menjalin lobi. Di antaranya para politikus Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. Sedangkan Imam didukung Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa tak menunjukkan sikap tegas.

Seorang politikus di lingkaran Istana menyatakan Yudhoyono sejak awal tak hendak mengajukan Nanan. Mantan Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian itu dianggap dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penolakan bahkan sudah dilakukan ketika Nanan diajukan sebagai calon Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dua tahun lalu. Diajukan bersama Inspektur Jenderal Alex Bambang Riatmodjo, ketika itu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Istana memilih calon ketiga: Susno Duadji, yang waktu itu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Nanan kembali diajukan menjadi calon untuk jabatan yang sama ketika Susno dicopot, akhir tahun lalu, tapi Istana memilih

Komisaris Jenderal Ito Sumardi.

Dengan pencalonan Imam yang belum kukuh dan Nanan ditolak, tak ada pilihan lain, calon alternatif diajukan. Pada Ahad malam dua pekan lalu, sempat muncul kabar Ito bakal ditunjuk. Wakil Ketua Dewan Pramono Anung di akun Twitter-nya menulis: calon yang diusulkan Presiden berpangkat komisaris jenderal dan pernah dua kali menjadi Kapolda di Sumatera. "Dia juga pernah menjabat Kapolwil di Surabaya," ia menulis. Ia merujuk pada Ito, yang pernah menjadi Kapolda Riau dan Kapolda Sumatera Selatan.

Ditemui pada Jumat pekan lalu, Ito Sumardi mengatakan bingung karena disebut-sebut menjadi calon Kepala Kepolisian. "Saya tidak pernah tahu, tidak pernah diberi tahu, dan tidak pernah dipanggil soal itu," katanya kepada wartawan *Tempo*, Mustafa Silalahi.

Timur Pradopo bukannya tak pernah masuk radar Istana. Yudhoyono pernah berada di tim yang sama ketika bertugas menjadi pasukan perdamaian di Bosnia. Pribadi Timur yang rendah hati dan tidak suka meledak-ledak juga disukai. Tapi jenjang kepangkatannya menjadi persoalan.

Pada Oktober 2009, Badan Intelijen dan Keamanan melakukan "penyelidikan kompetensi secara tertutup dengan mengutamakan obyektivitas" ter-

hadap lima perwira tinggi. Dianggap memenuhi syarat menjadi calon, badan itu meneliti Nanan Soekarna, Inspektur Jenderal Oegroseno, Imam Sudjarwo, Timur Pradopo, plus Komisaris Jenderal Susno Duadji, ketika itu Kepala Badan Reserse Kriminal. Hasilnya, Timur menempati posisi ketiga di bawah Susno dan Imam.

Peluangnya dinilai tertutup karena pangkat Timur tak kunjung meningkat menjadi komisaris jenderal. Padahal, jika diinginkan, ia bisa segera mengisi posisi Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan. Sebab, masa dinas Komisaris Jenderal Iman Haryatna memang segera berakhir. Pangkat Timur tetap bintang dua, hingga Jenderal Bambang Hendarso mengajukan Imam dan Nanan ke Presiden. Neta S. Pane, Koordinator Indonesia Police Watch, mengatakan langkah Timur untuk naik pangkat agak tersendat.

SELALU ada yang kecewa dari proses pemilihan. Aktivis Usman Hamid, yang dikenal dekat dengan Jenderal Bambang Hendarso, mengatakan proses pencalonan Timur melahirkan pasukan sakit hati di Markas Besar Kepolisian. Dia mengatakan bertemu seorang jenderal yang sempat berencana meletakkan jabatan karena tak jadi dicalonkan. Menurut Usman, sang perwira tinggi mengeluh, "Saya gagal akibat rumor yang tidak terbukti dan itu dipercaya Presiden."

Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, membantah adanya kecacauan dalam penunjukan calon Kepala Kepolisian. Menurut dia, proses yang dilakukan Presiden telah sesuai aturan. "Semua proses taat asas," kata Julian.

Terlepas dari kontroversi penunjukannya, Timur ada kemungkinan bakal mulus dalam proses di Dewan Perwakilan Rakyat. Rabu pekan lalu, dia memenuhi undangan pemimpin Dewan untuk melakukan "silaturahmi". "Pak Timur tidak akan mendapat halangan," kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Dewan, se usai pertemuan. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno juga memastikan fraksinya menyetujui pilihan Presiden. "Kami sepenuhnya mendukung," katanya.

Menunggu persetujuan Dewan, Timur menjadi tuan rumah pertemuan para jenderal kepolisian pada Jumat malam pekan lalu. Dipimpin Jenderal Bambang Hendarso, pertemuan itu diikuti sejumlah kepala kepolisian daerah. Untuk sementara, kontroversi pencalonan Kepala Kepolisian berakhir di penunjukan Timur Pradopo.

Setri Yasra, Sunudyantoro, Eko Ari Wibowo, Budi Setyarso

Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri; Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; serta Komjen Polisi Timur Pradopo (atas).

Yudhoyono pernah berada di tim yang sama ketika bertugas menjadi pasukan perdamaian di Bosnia.



AP PHOTO/STEVEN SENNE



Geng Bosnia di Pucuk Bhayangkara

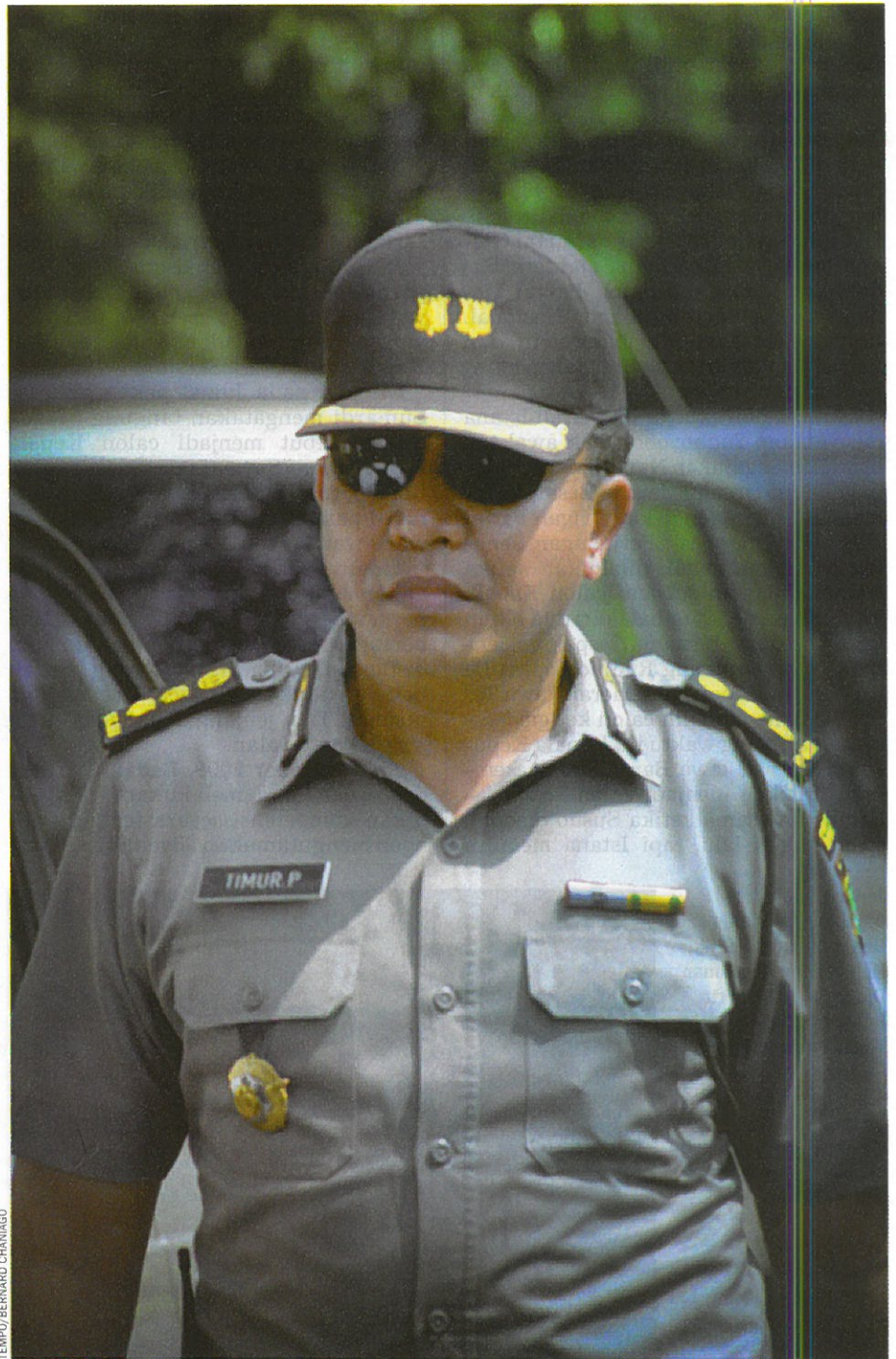
Timur memiliki perilaku yang disukai Yudhoyono: kalem, sopan, dan tak bermanuver. Dekat dengan Cikeas.

TIGA perwira tinggi kepolisian itu dikenal sebagai "Geng Bosnia". Yang pertama, Komisaris Jenderal Ito Sumardi, kini Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Lalu Komisaris Jenderal Timur Pradopo, yang pekan lalu dilantik menjadi Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan. Terakhir Komisaris Jenderal Wahyono, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan di Markas Besar Kepolisian. "Mereka sering disebut Geng Bosnia di Trunojoyo," kata Neta S. Pane, Koordinator Police Watch.

Bosnia dilanda perang setelah melepaskan diri dari Yugoslavia pada 1992. Pembunuhan etnis besar-besaran berlangsung di wilayah ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menurunkan pasukan United Nations Protection Force. Indonesia menjadi bagian dari misi ini, dengan mengirimkan Pasukan Garuda XIV. Brigadir Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, yang baru saja meninggalkan pos Komandan Komando Resor Militer Pamungkas/Yogyakarta, ditunjuk menjadi komandan pasukan ke Bosnia-Herzegovina ini.

Di Semenanjung Balkan, Yudhoyono bertugas enam bulan, sejak November 1995 hingga April 1996. Menurut buku *SBY Sang Demokrat*, Yudhoyono tiba-tiba mendapat tugas dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk berangkat ke Bosnia. Ia memimpin 650 pemantau militer dari sejumlah negara. Kontingen Garuda XIV terdiri atas batalion zeni, batalion kesehatan, tim pemantau militer, dan beberapa staf.

Menjelang akhir masa tugasnya di Bosnia, datang satu tim polisi sipil yang berjumlah 40 orang. Timur Pradopo, Ito Sumardi, dan Wahyono adalah bagian dari tim ini. Sejak itu hubungan ketiga perwira tersebut dengan Yudhoyono, yang kini menjadi



TEMPO/BERNARD CHANIAGO

presiden, mulai terjalin.

Itu sebabnya, seorang politikus partai pendukung Yudhoyono mengatakan tak kaget ketika Presiden mengajukan Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Negara, Senin pekan lalu. "Saya sudah mendengar informasi bahwa Presiden sebenarnya memilih Timur sejak dua bulan lalu," katanya. Ia mengatakan Yudhoyono sudah mengetahui kerja dan loyalitas Timur. Presiden juga menyukai pem-

bawaan Timur yang rendah hati dan tidak suka meledak-ledak. "Tipe orang seperti ini yang disukai Yudhoyono," kata sang politikus.

Sumber di kalangan Istana Kepresidenan mengungkapkan Timur jauh-jauh hari sudah masuk radar Yudhoyono. Hubungan Yudhoyono dengan Timur bukan semata-mata hubungan kerja. Apalagi keluarga Yudhoyono dan keluarga Timur saling kenal.

Menurut Neta, penunjukan Timur

Letnan Kolonel Timur Pradopo saat menjabat Kepala Polres Jakarta Pusat, 1999 (kiri).

Kandidat Kepala Polri, Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo dan Komisaris Jenderal Nanan Soekarna (kanan).



menjadi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Juni lalu, juga atas persetujuan Yudhoyono. Pengangkatan kepala kepolisian daerah memang menjadi wewenang Kepala Kepolisian Negara. Tapi, khusus untuk Jakarta, pengangkatan kepala kepolisian daerah harus melalui persetujuan presiden walau secara informal. "Kapolda Jakarta jatah jenderal polisi yang menjadi kepercayaan presiden," katanya.

Sebelum bergeser ke Ibu Kota, Timur adalah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sebulan sebelum pergeseran, Kongres Partai Demokrat bentukkan Yudhoyono digelar di Bandung. Tiga hari mengamankan kongres, menurut sumber di kepolisian, Timur punya banyak kesempatan menemani Yudhoyono. Dalam beberapa kali kesempatan mereka makan siang dan makan malam bersama. Dianggap sukses mengamankan kongres, kata sumber itu, Timur ditempatkan di Jakarta.

Kedekatan Yudhoyono dengan Timur, kata sumber lain, juga terbangun dari hubungan masa lalu. Soekotjo, ayahanda Irianti Sari Andayani, istri Timur Pradopo, adalah Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro, Jawa Tengah, pada 1980-1982. Ia pernah menjadi anak buah Sarwo Edhie Wibowo di Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat. Walhasil, hubungan antara keluarga Sarwo Edhie dan keluarga

Soekotjo pun tak terputus.

Istri Sarwo Edhie, Sunarti Sri Hadiah, sudah lama mengenal istri Timur. Sumber di kepolisian mengatakan Timur pun kerap mengunjungi Bu Ageng, panggilan buat istri Sarwo Edhie Wibowo, di kediamannya, Cijantung, Jakarta Timur. Ia datang untuk sekadar menanyakan kabar kesehatan ibu mertua Yudhoyono itu.

Sewaktu menjadi Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, tugas Timur mencakup Cikeas, kediaman pribadi Yudhoyono. Tak aneh jika Timur pun sering menyambangi wilayah ini. Timur lagi-lagi menunjukkan perhatian kepada Bu Ageng. Umumnya ihwal kesehatan. Tuter kata Timur yang halus, menurut sumber, membuat Bu Ageng merasa dekat. "Beliau sering menanyakan kabar Timur," katanya.

Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia yang lama menjadi kon-

Yudhoyono sudah mengetahui kerja dan loyalitas Timur. Presiden juga menyukai pembawaan Timur yang rendah hati dan tidak suka meledak-ledak.

sultan Markas Besar Kepolisian, mengatakan bahwa Yudhoyono dengan Timur berhubungan dekat. Ia pun mengatakan selama menjadi Kapolda Jawa Barat, Timur kerap bertandang ke kediaman Yudhoyono di Cikeas. "Ya, itu karena tugas sebagai Kapolda," kata Adrianus.

Timur menampik tuduhan dekat dengan Yudhoyono. "Tidak ada hubungan khusus dengan Presiden," kata Timur sebelum memenuhi undangan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, Rabu pekan lalu. Ahmad Mubarak, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengatakan kedekatan Yudhoyono-Timur karena pernah bekerja bersama di Bosnia. Tidak ada kedekatan karena kekerabatan, kekeluargaan, atau yang bersifat khusus lainnya.

Keluarga Timur di tempat kelahirannya, Jombang, Jawa Timur, tak mau berkomentar banyak tentang sepak terjang dan kariernya di kepolisian. Ningerum, adik Timur yang bekerja di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang, mengatakan, "Keluarga di Jombang tidak boleh omong apa-apa ke media."

Sriati, ibunda Timur, sedang di Jakarta. Jumat pekan lalu, ia tidak ada di rumahnya yang sederhana di Jalan Patimura, Jombang. Aning, penunggu rumah, diwanti-wanti agar diam. "Saya dilarang ngomong apa-apa," katanya.

Sunudyantoro, Muhammad Taufik (Jombang)



TEMPO/BUDI YANTO

Rapor Merah Timung

Timur memperoleh nilai rendah dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dikaitkan dengan tragedi Trisakti dan FPI.

RUMAH bercat putih di Dusun Gempol, Jombang, Jawa Timur, itu tak lagi berpenghuni. Yang tersisa hanya dua ranjang bambu dan lemari berisi tumpukan buku dimakan rayap. "Timung dulu tinggal di sini sejak umur tujuh bulan sampai lulus sekolah menengah atas," kata Suarti, Selasa pekan lalu.

Timung adalah sapaan Suarti buat keponakannya, Komisaris Jenderal Timur Pradopo. Menurut dia, Timur, sulung dari tujuh bersaudara anak pasangan guru sekolah dasar Sigit Sai'un dan Sriati, meninggalkan Gempol setelah diterima di Akademi Kepolisian pada 1974.

Tamat dari akademi empat tahun kemudian, Timur meniti kariernya dari Satuan Lalu Lintas. Ia mulai berdinan di Semarang dan Kedu, Jawa Tengah, lalu pindah ke Jakarta. Pria kelahiran Jombang 54 tahun lalu ini terbilang "beruntung". Ia hanya dimutasi di

seputaran Ibu Kota, paling jauh Banten dan Jawa Barat.

Toh, bukan berarti semua tugasnya mulus. Pada 12 Mei 1998, ketika menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, petaka itu terjadi. Empat mahasiswa ditembak di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Peristiwa ini memicu kerusuhan besar-besaran yang menghanguskan Ibu Kota. Sepekan kemudian, rezim Orde Baru runtuh diterjang gelombang tuntutan reformasi.

Dua belas tahun setelah tragedi itu, bintang Timur bersinar terang. Ia dipromosikan menjadi Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan Markas Besar Kepolisian sekaligus naik pangkat menjadi komisaris jenderal. Malam harinya, ia diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Dewan Perwakilan Rakyat sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI.

Pengajuan oleh Yudhoyono itu menggejutkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Akhir September lalu, komisi

Unjuk rasa buruh di Bandung, saat Timur Pradopo menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung pada 2001. Berakhir dengan pembakaran kendaraan dan gedung pemerintah.

ini diminta memeriksa delapan perwira tinggi oleh Komisi Kepolisian Nasional. Delapan nama itu dianggap memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Kepolisian. Komisi Nasional diminta mengecek rekam jejak mereka di bidang hak asasi manusia.

Menurut Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Yosep Adi Prasetyo, nama Timur masuk daftar tapi bukan termasuk yang diunggulkan. Saat itu Komisi Kepolisian hanya meminta ada perhatian khusus buat dua calon kuat, yakni Komisaris Jenderal Nanan Soekarna dan Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo.

Yosep bercerita Komisi Nasional menelusuri karier para kandidat. "Kami mengecek apakah mereka terlibat kasus pelanggaran hak asasi," kata Yosep. "Kami juga melihat bagaimana mereka menangani kasus pelanggaran hak asasi," katanya.

Komisi itu juga menelisik pernyataan setiap calon mengenai hak asasi manusia sejak masih menjabat kepala kepolisian sektor. Diteliti juga pengalaman

Memfaatkan Diskon Kartu Kredit



Oleh: **STEPHEN LIESTYO***

KARTU KREDIT sudah menjadi alat bayar yang tidak bisa dipisahkan dalam aktifitas masyarakat sehari-hari. Selain lebih praktis, menggunakan kartu kredit secara tepat memang memberi keuntungan lebih karena alat bayar ini selalu ditawarkan dengan aneka promo menarik. Misalnya potongan khusus atau *cashback* saat membayar makan di restoran atau berbelanja.

Keuntungan dengan menggunakan kartu kredit, nasabah mendapatkan *point reward* atas transaksinya yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam barang menarik/ voucher. Kartu kredit juga sangat praktis digunakan untuk membayar tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, *handphone*, televisi berlangganan dan sebagainya.

Tidak hanya itu, kartu kredit juga memberi keuntungan lebih saat digunakan untuk melancong ke luar kota atau perjalanan ke luar negeri. Sejumlah kartu kredit yang memberikan promo berupa potongan harga untuk pembelian tiket perjalanan, membayar paket liburan, memesan kamar

hotel, dan lain-lain.

Keuntungan lebih lainnya yang dapat dinikmati oleh pemegang BII Kartu Kredit, salah satunya dengan mendapatkan diskon 50% untuk bersantap di berbagai restoran favorit yang ada di kota Jakarta, Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya. Promo ini bisa Anda nikmati sejak 1 Oktober hingga 31 Oktober 2010 mendatang.

Inilah kesempatan Anda mengajak keluarga ataupun rekan kerja untuk memanjakan selera kuliner dan menikmati aneka masakan di restoran favorit. Anda bisa memilih masakan kesukaan, baik bermenu ala daerah, nasional maupun internasional.

Anda bisa datang langsung ke restoran tersebut. Di Jakarta, pemegang BII Kartu Kredit bisa memilih restoran Long Grain, My Hanoi House, My Hanoi Villa, Cafe De Kalaha, Tan Tan, Takigawa, Fok Luk Sau, PHO 2000, Pizza Bar, Poke Sushi, King of Thai dan EASTERN.

Sementara di Medan ada Fusion Bistro, Butter Cup, Jimbaran, DOME dan Jumbo.

Pilihan restoran dengan diskon 50% di Bandung adalah Tomodachi, Pasar Tong Tong, Ta Yang Suki, Mangkok ayam, EASTERN, Po Ka Tiam.

Di Semarang ada KOBE Garden, Linds Ice Cream&Resto, Palace, Planet Steak, Nori. Sedangkan di Surabaya bisa mencoba menu di Restoran Kapin, Element Cafe, djatilegi, Djimbaran dan Prima Taste.

Promo diskon 50% ini berlaku untuk jenis BII Kartu Kredit (VISA/MasterCard) seperti Reguler / Klasik, mc2, Gold, Platinum, Infinite, Kartu Co Branding Lion Air dan JCB (Regular & Gold).

BII Kartu Kredit memang didesain untuk kebutuhan transaksi sehari-hari dan mendukung memenuhi gaya hidup Anda. Segera ajukan aplikasi BII Kartu Kredit dan manfaatkan semua keuntungan dan kelebihan yang ditawarkan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi BII Customer Care di nomor telepon 69811 via ponsel atau (021) 78869811. ●

*Penulis adalah Direktur Perbankan Konsumer BII

50% DISCOUNT

BII FOOD FESTIVAL

Maybank

MEDAN

- FUSION
- BUTTERCUP
- Jimbaran
- DOME
- Jumbo

BANDUNG

- TOMODACHI RESTO
- PASAR TONG TONG
- TA YANG SUKI
- EASTERN
- PO KA TIAM

JAKARTA

- LONG GRAIN
- FEARLESS
- Tan Tan
- FOK LUK SAU
- POKE SUSHI
- EASTERN

SEMARANG

- KOBE GARDEN
- LINDS
- PALACE
- PLANET
- NORI

SURABAYA

- KAPIN
- ELEMENT
- djatilegi
- Djimbaran



mengikuti pelatihan tentang hak asasi manusia. "Jadi, kami melihat juga seperti apa wawasan mereka mengenai hak asasi manusia," kata Yosep.

Hasilnya, muncul urutan nama berdasarkan skor. Urutan teratas adalah perwira yang dianggap punya komitmen tinggi terhadap perlindungan hak asasi. "Timur bukan yang teratas," kata Yosep. Sumber-sumber *Tempo* yang membaca surat rekomendasi itu menyebutkan, nilai Timur paling jelek. "Dia di urutan paling bawah," ujar seorang sumber.

Rapor merah Timur itu diberikan karena Komisi Nasional Hak Asasi menemukan Timur terlibat kasus Trisakti. Yosep menjelaskan nilai Timur kian me-

demonstrasi.

Mangkirnya Timur dinilai Yosep sebagai lemahnya komitmen calon orang nomor satu di korps baju cokelat tersebut terhadap perlindungan hak asasi. "Seharusnya ada calon Kepala Kepolisian yang lebih punya komitmen terhadap penegakan hak asasi," kata Yosep.

Selain itu, Komisi Nasional memberikan catatan negatif terhadap sikap Timur yang menggandeng Front Pembela Islam dalam pengamanan pada bulan puasa lalu. "Organisasi itu beberapa kali diadakan dalam kasus pelanggaran hak asasi, tapi Timur malah merangkul mereka untuk menjaga keamanan," kata Yosep.

ini berakhir dengan pembakaran kendaraan bermotor dan perusakan kantor pemerintah daerah, Gedung Sate.

Belakangan, masalah yang sama terulangatkala Timur mengepalai Kepolisian Daerah Metro Jaya. September lalu, perang antarkelompok preman pecah pada saat persidangan kasus pembunuhan di kafe Blowfish. Tiga orang tewas dalam bentrokan berdarah di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan ini.

Namun kekerasan itu tak dianggap sebagai masalah. Ketika Badan Intelijen Keamanan Markas Besar Kepolisian melakukan "penelitian" terhadap delapan calon Kepala Kepolisian pada Oktober tahun lalu, Timur dilaporkan bersih dari masalah. Berbeda dengan Komisaris Jenderal Nanan Soekarna, kini Inspektur Pengawasan Umum, yang dianggap tak sigap menghadapi demonstrasi di gedung DPRD Sumatera Utara. Demonstrasi ini menewaskan Ketua Dewan Azis Angkat.

Selama memimpin Kepolisian Daerah Metro Jaya, Timur juga tak menyelesaikan dua pekerjaan rumahnya, antara lain kasus penyerangan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama Satria Langkun. Tama, yang aktif melaporkan rekening tak wajar para perwira polisi, diserang pada dini hari, Juni lalu.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai Timur tak serius mengejar penganiaya Tama, meski Presiden Yudhoyono sudah meminta penyerangan itu segera diungkap. "Sudah tiga bulan lewat tapi hasilnya nihil," ujarnya.

Emerson juga menyoroti lainnya Timur melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Setiap pejabat wajib melaporkan hartanya setiap kali mendapat promosi atau mutasi, tapi Timur baru dua kali melapor. Padahal dalam lima tahun terakhir ia sudah lima kali berganti jabatan.

Ketika melapor pada 2008, Timur menyatakan total hartanya sekitar Rp 2,1 miliar. Kekayaan itu berasal dari dua bidang tanah dan bangunan di Tangerang senilai Rp 1,384 miliar yang berasal dari warisan. Lalu ada empat kendaraan senilai Rp 305 juta serta logam mulia dan simpanan di bank senilai hampir Rp 400 juta.

Timur memperbarui laporan kekayaannya pada awal bulan lalu, yang masih diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau dia saja tidak taat aturan tentang laporan kekayaan, bagaimana bisa dia dipercaya punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi?" kata Emerson.

Oktamandjaya Wiguna (Jakarta),
Muhammad Taufik (Jombang), Ayu Cipta (Tangerang),
Erick P. Hardi (Bandung), Wasi'ul Ulum (Banten)



BODI CHANDRA/DP

Timur Pradopo (kiri) sebagai Kepala Polres Jakarta Barat saat memimpin pengendalian keamanan pada demonstrasi Trisakti, 1998.

rosot karena menolak memberikan keterangan kepada Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tim bentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini bertugas menyelidiki kasus Trisakti serta Kasus Semanggi I dan II. Padahal Timur adalah salah satu komandan lapangan operasi keamanan ketika tragedi Trisakti meledak.

Mantan Sekretaris Komisi Penyelidikan Usman Hamid sempat melayangkan dua panggilan, tapi Timur selalu mangkir. "Keterangannya kami perlukan karena dia ada di Trisakti sewaktu penembakan terjadi," kata Usman. Bahkan, kata dia, Timur ikut bertanggung jawab karena gagal mengendalikan situasi hingga terjadi penyerbuan terhadap mahasiswa yang melakukan

Namun Timur tak melihat langkahnya itu sebagai kekeliruan. "Kepolisian harus memberdayakan semua elemen masyarakat untuk membantu menjaga keamanan," kata dia.

Markas Besar Kepolisian pun menganggap Timur tak terlibat dalam tragedi Trisakti karena tak ada keputusan hukum yang menyatakan Timur bersalah dalam kasus itu. "Itu tuduhan orang luar. Kami tidak punya catatan itu," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Iskandar Hasan.

Timur juga dikaitkan dengan kasus kekerasan lain. Saat menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat pada 1999, mahasiswa Universitas Indonesia, Yap Yun Hap, juga tewas ditembak setelah berdemo. Pindah jadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung, pada 2001, terjadi unjuk rasa buruh menentang keputusan presiden tentang perburuan. Demonstrasi